

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang Evaluasi Penerapan Sistem *E-Procurement* Bidang Jalan dan Jembatan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan variabel – variabel pelaksanaan pelelangan secara elektronik antara lain tujuan pengadaan secara elektronik menurut Perpres 54 tahun 2010 pasal 107, prinsip pengadaan secara elektronik menurut LKPP dan faktor kemampuan Sumber Daya Manusia. Teridentifikasi sebanyak 8 jenis variabel yang terdiri dari 46 jenis indikator pelaksanaan pelelangan secara elektronik. Secara umum pengguna jasa/pegawai ULP dan penyedia jasa/kontraktor memberikan persepsi yang sedang sampai sangat baik terhadap indikator pelaksanaan pelelangan di propinsi Sulawesi Selatan;
2. Variabel ‘Tingkat efisiensi proses pengadaan’ memiliki penilaian paling rendah menurut pengguna jasa pada tahun 2013 dan 2014. Sementara itu, pada tahun 2015, variabel dengan penilaian paling rendah adalah variabel ‘Pemenuhan kebutuhan akses informasi yang *real time*’. Menurut penilaian pengguna jasa/pegawai ULP, terjadi penurunan jumlah indikator pelaksanaan pelelangan yang memiliki nilai buruk antara tahun 2013 sampai 2015;
3. Variabel ‘Kemampuan Sumber Daya Manusia’ memiliki penilaian paling rendah menurut penyedia jasa pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015,

variabel dengan penilaian terendah adalah variabel 'Dukungan proses monitoring dan audit'. Menurut penilaian penyedia jasa/kontraktor, jumlah indikator pelaksanaan pelelangan yang memiliki nilai buruk antara tahun 2013 sampai 2014 cenderung meningkat. Namun dalam tiga tahun tersebut, indikator dengan penilaian buruk menurut penyedia jasa jumlahnya lebih sedikit daripada pengguna jasa;

4. Peringkat pertama tingkat kepentingan indikator pelaksanaan pelelangan menurut persepsi pengguna jasa/pegawai ULP adalah indikator V.2. 'Kelancaran akses informasi bebas dari gangguan cuaca'. Sementara itu, peringkat pertama tingkat kepentingan pelaksanaan pelelangan yaitu indikator VII.1.a. 'Jaminan kerahasiaan dokumen digital' dan indikator VII.1.b. 'Jaminan keaslian dokumen digital';
5. Perbedaan penilaian antara pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap indikator pelaksanaan pelelangan secara elektronik antara tahun 2013 sampai 2015 cenderung menurun. Penurunan jumlah indikator yang berbeda secara signifikan dari 43.47% menjadi 17.39%. Tren ini merupakan hasil yang positif karena baik penyedia maupun pengguna jasa yang berkedudukan sama dalam pelelangan diharapkan memiliki pandangan yang sama pula. Sebagai pengguna portal pelelangan, kedua responden ini diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam mengoperasikan portal pelelangan;
6. Perbedaan persepsi antara pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap tingkat kepentingan indikator pelaksanaan pelelangan secara elektronik hanya sebesar 17.39%. Namun yang menjadi perhatian adalah perbedaan tersebut sebagian besar bersumber dari variabel III 'mengenai efisiensi pelelangan'. Kondisi ini

menunjukkan belum ada kesepahaman antara penyedia jasa dan pengguna jasa mengenai kelayakan pemenang untuk mengerjakan suatu proyek. Hal ini disebabkan metode pelelangan yang cukup sederhana dibandingkan hasil yang akan dicapai dalam proyek. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan metode pelaksanaan pelelangan yang lebih mendetail namun cepat dalam pelaksanaan;

7. Perbedaan persepsi yang diperoleh antara tahun 2013, 2014 dan 2015 masing-masing responden, diketahui bahwa pengguna jasa menghasilkan perbedaan sebesar 47.82% sedangkan penyedia jasa menghasilkan 21.74%. Penyedia jasa cenderung memiliki persepsi yang konstan dalam menilai setiap perubahan dalam pelaksanaan pelelangan. Sementara itu, pengguna jasa memiliki perilaku yang lebih reaktif terhadap perubahan peraturan yang terjadi dalam sistem pelelangan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan realita di lapangan dimana setiap kesalahan yang terjadi dalam proses pelelangan yang diakibatkan oleh pegawai ULP akibatnya cukup fatal dalam proses pelelangan secara keseluruhan. Sementara itu, kontraktor cenderung mengikuti arahan yang diberikan pegawai ULP dan kesalahan yang terjadi tidak berkaitan dengan hukum;
8. Menurut pengguna jasa, tidak ada satupun variabel yang dapat dikatakan sukses pada tahun anggaran 2015. Adapun variabel IV 'Dukungan proses monitoring dan audit' dan V 'Pemenuhan kebutuhan akses informasi yang *real time*' memiliki tren menurun dengan indeks kesuksesan relatif kecil. Manajemen pengarsipan dalam portal pelelangan sebaiknya diubah agar memenuhi kebutuhan monitoring dan tidak dokumen fisik dalam jumlah besar

tanpa melibatkan banyak sumber daya. Prasarana terkait akses informasi terkini seperti kemampuan sinyal internet dan database informasi yang memiliki kepastian hukum perlu diterapkan dalam portal pelelangan. Tanpa hal tersebut pelelangan secara elektronik hanya menjadi faktor pendukung pelelangan manual;

9. Menurut penyedia jasa, satu-satunya variabel yang dapat dikatakan sukses adalah variabel VI 'Tingkat interoperabilitas dalam bertransaksi' yang terjadi pada tahun anggaran 2015. Satu-satunya variabel dengan tren kesuksesan menurun adalah variabel IV 'Dukungan proses monitoring dan audit'. Penilaian penyedia jasa terhadap variabel ini lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna jasa walaupun masih jauh dari batas indeks kesuksesan. Sama seperti pengguna jasa, faktor yang perlu ditingkatkan dalam portal pelelangan adalah manajemen pengarsipan;
10. Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas dapat diketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir, pelaksanaan pelelangan secara elektronik di propinsi Sulawesi Selatan memiliki penilaian dengan kategori baik namun belum dapat dikatakan sukses. Hanya ada satu dari delapan variabel pelaksanaan pelelangan yang dapat dikatakan sukses. Pelaksanaan sistem *e-Procurement* sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya memenuhi predikat sebagai sistem pelelangan elektronik menurut pengguna dan penyedia jasa. Beberapa kekurangan yang muncul menjadi rujukan untuk digunakan sebagai usulan perbaikan sistem pelelangan di masa yang akan datang. Sistem pelelangan yang dianut Kementerian PUPR masih merupakan sistem pendukung dan pelengkap pelelangan tradisonal yang telah ada sebelumnya.

## **5.2. Saran**

Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan membandingkan sistem pelelangan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2016 Kementerian PUPR mulai tahun anggaran 2016 tidak lagi menggunakan portal pelelangan sendiri namun telah bergabung dengan portal pengadaan LKPP. Disamping itu, ruang lingkup penelitian ini dapat dikembangkan hingga mencakup pelelangan jalan dan jembatan dalam satu Balai Pelaksana Jalan atau bahkan seluruh balai di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan karena pelelangan secara elektronik sebenarnya merupakan pelelangan yang berlaku secara nasional. Sehingga tidak hanya tingkat kesuksesan pelaksanaan pelelangan saja yang diperoleh namun juga karakter responden setiap daerah menjadi dapat dibahas untuk kemajuan institusi Kementerian PUPR.



## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, “Contractors Registrations System (CRS) (2015)”, ACRA Accounting and Corporate Regulatory Authority, tersedia di <https://www.acra.gov.sg>, diakses tanggal 18 Nopember 2015
- \_\_\_\_\_, “Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management (2010)”, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tersedia di <http://www.oecd.org>, diakses tanggal 29 Februari 2016
- \_\_\_\_\_, “Introducing for Tendering”, Small Bussiness NSW Commissioner, tersedia di <https://smallbiz.nsw.gov.au>, diakses tanggal 12 Oktober 2015
- \_\_\_\_\_, “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (2011)”, Majalah Pengadaan Indonesia Kredibel Edisi 01 bulan Oktober 2011 – Desember 2011, tersedia di <http://www.khalidmustafa.info>, diakses tanggal 22 Nopember 2014
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
- \_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- \_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- \_\_\_\_\_, “Portal *Full e-Procurement* Kementerian PUPR”, ([www.pu.go.id](http://www.pu.go.id), diakses tanggal 10 Oktober 2015)
- \_\_\_\_\_, “Procurement Policies Authority (2015)”, Buiding and Construction Authority (BCA), Price Quality Method Framework (PQMv2), tersedia di <http://www.bca.gov.sg>, diakses tanggal 18 Nopember 2015
- \_\_\_\_\_, “The Price-Quality Method (PQM) in Tender Evaluation (2015)”, Buiding and Construction Authority (BCA), tersedia di <https://www.GeBIZ.gov.sb>, diakses tanggal 18 Nopember 2015
- \_\_\_\_\_, UN Procurement Practitioner’s Handbook (2012), United Nations, Interagency Procurement Working Group (IAPWG), tersedia di <https://www.ungm.org>, diakses tanggal 27 Oktober 2015

- Arikunto S. (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Kelima, Jakarta : Rineka Cipta
- Alma B. (2010), “Metode dan Teknik Menyusun Tesis”, Edisi Ke-8, Penerbit Alfabeta, hal. 128
- Bedford, T. (2009), “Analysis of The Low-Bid Award System in Public Sector Construction Procurement”, *Library and Archives Canada, Department of Civil Engineering, University of Toronto*
- Eadie, R., Perera, S., Heaney, G., and Carlisle, J. (2006), “Drivers and Barriers to Public Sector E-Procurement within Northern Ireland’s Construction Industry”, *ITCon Vo. 12 (2007), Eadie et al., pg. 17*
- Eadie, R, Perera, S. and Heaney, G. (2010), “Identification of e-Procurement Drivers and Barriers for UK Construction Organisations and Ranking of These from The Perspective of Quantity Surveyors”, *Journal of Information Technology in Construction, ITcon Vol. 15 (2010), Eadie et al., pg. 23*
- Faisol, I.A., Tarjo dan Musyarofah, S. (2014), “Pengaruh Penerapan e-Procurement terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik”, *Jaffa, Vol. 02 No. 2 Oktober 2014, Hal. 71 - 90*
- Herzal F. (2015), “Jaminan Perlindungan Hukum dalam Upaya Administratif Sanggahan Banding pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Tesis Jurusan Magister Hukum Konstruksi, Universitas Parahyangan Bandung
- Ibem, E.O. dan Laryea, S. (2015), “E-Procurement Use in The South African Construction Industry”, *Journal of Information Technology in Construction, ITcon Vol. 20 (2015), Ibem & Laryea, pg. 364*
- Lou, E. W., and Ashalwi, M. (2009). “Critical Success Factors For E-Tendering Implementation In Construction Collaborative Environments: People And Process issues”, *Journal of Information Technology in Construction , XIV, 98-109*
- Mackay, K. (2007), “Membangun Sistem Pemantauan dan Evaluasi, Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik”, *Independent Evaluation Group (IEG) Bank Dunia*, tersedia di <https://ieg.worldbankgroup.org>, diakses tanggal 29 Februari 2016
- Martin, J. (2008), “Web-Based Electronic Bidding United Kingdom, Practical Experience”, *AACE International Transactions, 2008; Proquest Science Journals, pg. IT31*



- Nurisra (2011), "Identifikasi Kendala Penerapan *e-Procurement* pada Pengadaan Konstruksi di Banda Aceh", *Seminar Nasional -1 BMPTTSSI – KoNTekS 5, Universitas Sumatera Utara, Medan*
- Panayiotou, N.A., Gayaialis, S.P., Tatsiopoulos, I.P. (2004), "An E-procurement System For Governmental Purchasing", *International Journal of Production Economics, Vol. 90, Hal. 79–102*
- Rankin, J.H. (2006), "e-Procurement in The Atlantic Canadian AEC Industry", *ITCon Vol. 11 (2006), Rankin et al., pg.75*
- Ren, Z., Kwaw, P., and Yang, F. (2012), "Ghana's Public Procurement Reform and The Continuous Use of The Traditional Procurement System", *Emerald Group Publishing Limited, Built Environment and Asset Management, Vol. 2 No. 1, 2012, pp. 56-69*
- Rinasari (2010), "Upaya Pencegahan Persekongkolan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Tesis Jurusan Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Parahyangan Bandung
- Rofikoh, N. dan Noor, A. M. (2013), "Mewujudkan *Good Governance* Melalui *E-Procurement*", FISIP Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta
- Saputra, F. (2009), "Kajian Penerapan *e-Procurement* pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ", Tesis Jurusan Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Parahyangan Bandung
- Santoso, Singgih (2009), "Menguasai Statistik Non Parametrik : Konsep Dasar dan Aplikasi dengan SPSS", Edisi Pertama, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. (1989), "Metode Penelitian Survei", Jakarta: LP3ES.
- Solihin, D. (2014), "Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan", disajikan dalam Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana Tk. Muda Angkatan XXVI LPEM-FEUI Jakarta tanggal 1 Oktober 2014, tersedia di <https://www.slideshare.net>, diakses tanggal 29 Februari 2016
- Sugiyono (2009), "Statistik Untuk Penelitian", Penerbit Alfabeta, Bandung
- Suliyanto (2011), "Perbedaan Pandangan Skala Likert Sebagai Skala Ordinal atau Skala Interval", *Prosiding Seminar Nasional Statistika, Universitas Diponegoro 2011, ISBN: 978-979-097-142-4*
- Sutedi, A. (2012), "Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya", Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika

- Wang, Y., Xi, C., Zhang, S., Yu, D., Zhang, W., and Li, Y. (2014), "A Combination of Extended Fuzzy AHP and Fuzzy GRA for Government E-Tendering in Hybrid Fuzzy Environment", *Hindawi Publishing Corporation, The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 123675, 11 pages*
- Yusrizal (2009), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kompetensi Profesional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa", Tesis Jurusan Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Parahyangan Bandung